

Receive : 27 May 2025

Revised : 30 May 2025

Accepted : 31 May 2025

Jurnal ADMINISTRATOR

P-ISSN : 1858-084X

E-ISSN : 2808-5213

DOI : 10.55100/administrator.v7i1.101

Vol. 7 No. 1, June 2025, Hlm. 53-61



Evaluasi Kebijakan Pemekaran Kecamatan Pada Aspek Pembangunan Di Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong

Srifridayanti

E-Mail : srifridayanti90@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pertumbuhan ekonomi Kecamatan Siniu serta mengidentifikasi kendala pengembangan Kecamatan setelah pemekaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Analisa data sekunder dan wawancara terhadap informan penelitian di Lapangan. Data-data yang dapat dianalisa dengan menggunakan pendekatan Analisa deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan keadaan objek penelitian sesuai data dan fakta yang ditemukan dalam proses berlangsungnya pemekaran Kecamatan Siniu. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pertumbuhan kecamatan Siniu meningkat dari sejak pembentukannya. Namun peningkatan tersebut masih relative kecil. Dari aspek ekonomi, keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala bagi wilayah Kecamatan Siniu untuk mengelola sumberdaya alam dan potensi-potensi yang ada di wilayah Kecamatan Siniu. Dari aspek pelayanan public, yaitu Pendidikan dan kesehatan dapat disimpulkan belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan kondisi sarana sekolah dan murid yang tidak sebanding dengan jumlah tenaga pendidik. Sedangkan dibidang Kesehatan ejak terbentuk pada tahun 2008 terjadi peningkatan jumlah fasilitas Kesehatan. Walaupun relative kecil namun fasilitas Kesehatan tersebut dirasakan sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Kata Kunci : Pemekaran Kecamatan, Kecamatan Siniu, Parigi Moutong

Receive : 27 May 2025
Revised : 30 May 2025
Accepted : 31 May 2025



ABSTRACT

The purpose of this research is to identify the economic growth of Siniu Sub-district and identify the constraints to the development of the Sub-district after expansion. The method used in this research is to use secondary data analysis and interviews with research informants in the field. The data that can be analyzed using a qualitative descriptive analysis approach, namely describing the state of the object of research according to the data and facts found in the process of expansion of Siniu Subdistrict. Based on the results of the study, it is concluded that the growth of Siniu sub-district has increased since its formation. However, the increase is still relatively small. From the economic aspect, limited human resources are an obstacle for the Siniu Sub-district area to manage natural resources and potentials in the Siniu Sub-district area. From the aspect of public services, namely education and health, it can be concluded that it has not been maximized. This is due to the condition of school facilities and students that are not proportional to the number of educators. Meanwhile, in the health sector, since its formation in 2008 there has been an increase in the number of health facilities. Although relatively small, these health facilities are very useful for the community.

Keyword : Sub-district Expansion, Siniu Sub-district, Parigi Moutong

LATAR BELAKANG

Era reformasi telah memberikan ruang yang lebih terbuka kepada masyarakat untuk lebih mengembangkan dan membangun dirinya sendiri. Salah satu produk dari era reformasi itu adalah otonomi daerah yang secara konseptual memperlihatkan adanya perubahan secara signifikan pada model dan paradigma pemerintah daerah. Dalam mendukung kebijakan otonomi daerah, pemerintah telah mengatur dalam Undang-undang No 32 tahun 2004. Berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut maka dapat dijelaskan bahwa keinginan masyarakat daerah untuk membentuk daerah otonom baru memang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejalan dengan banyaknya keinginan untuk melakukan pemebntukan daerah otonom barum baik berupa pemekaran maupun peningkatan status khususnya di daerah kabupaten dan kota sesuai dengan mekanisme pembentukan daerah otonom maka pemerintah mengeluarkan peraturan NO 129 Tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan, kriteria, prosedur, pembiayaan pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah. Pemekaran wilayah sebagai impilkasi politik reformasi perlu dikelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan benturan-benturan dan masalah yang tidak

sejalan dengan semangat reformasi itu sendiri. Pemekaran wilayah dapat diharapkan memacu perkembangan social, peningkatan ekonomi,peningkatan kualitas demokrasi (syaukani/A.Gaffar/R.Rasyid, H. 202 CE.) Pemekaran Wilayah yang dicanangkan seperti sekarang ini diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah, disamping menciptakan keseimbangan pembangunan antar daerah Indonesia. Pembangunan daerah akan berjalan kalua sejumlah prasyarat dapat dipenuhi, terutama oleh para penyelenggara pemerintahan di daearha yaitu pihak legislative dan eksekutif. Otonomi daerah memiliki sejumlah kewenangan. 11 kewenangan wajib sebagaimana ditentukan oleh UU No. 22 Tahun 1999. Kesebelas kewenangan wajib tersebut merupakan modal dasar yang sangat penting untuk pembangunan daerah.

Kecamatan Siniu diresmikan pada tanggal 18 Januari tahun 2008 oleh Bupati Parigi Moutong Longki Djanggola,M.Si. Kecamatan Siniu berada dalam wilayah Kabupaten Parigi Moutong. Pembentukan Kecamatan Siniu berawal dari keinginan kuat dan aspirasi masyarakat Siniu yang menginginkan perubahan yang lebih baik. Terbentuknya 2 kecamatan di wilayah kabupaten Parigi Moutong telah menimbulkan semangat dari tokoh masyarakat, ada yang pesimis dan ada

yang menyikapi dengan positif. Masyarakat yang bersikap pesimis berpendapat bahwa tidak ada potensi daerah yang menonjol di wilayah Siniu, desa-desa yang ada di Wilayah Siniu juga termasuk dalam kategori desa tertinggal di provinsi Sulawesi Tengah. Kondisi tersebut menimbulkan keraguan di beberapa tokoh masyarakat untuk membentuk Kecamatan sinui. Sementara yang bersikap optimis beranggapan bahwa dengan semangat perubahan akan mampu mengubah pola pikir masyarakat, harapan untuk kondisi yang lebih baik akan meningkatkan kinerja aparatur daerah untuk mengejar ketertinggalan dari kecamatan lain.

Pemerintah kecamatan Siniu seharusnya mampu mengolah dan memanfaatkan potensi-potensi sumberdaya alam yang ada di wilayahnya, seperti Kawasan pariwisata yang ada di Desa Marantale, perkebunan kelapa di Desa Siniu yang menjadi produk unggulan di daerah Kabupaten Parigi Moutong. Namun sayangnya disisi lain potensi sumber daya alam yang melimpah ternyata belum diimbangi kemampuan sumberdaya manusia yang mumpuni. Harus diakui didalam pengelolaan sumber daya alam, kemampuan sumber daya manusia seringkali belum mendukung. Personal seharusnya bertugas mengelola, ternyata belum memiliki kemampuan untuk dapat

memanfaatkan secara maksimila potensi alam yang dimiliki Kecamatan Siniu. Hal ini bisa dilihat dari kurang terawatnya kawasan pariwisata yang ada seperti Kawasan air terjun Likunggavali dan Pantai Nalera. Selain itu, kualitas aparat pemerintah daerah juga masih belum sesuai harapan, fungsi pelayanan umum oleh aparat pemerintah belum sepenuhnya menjamin kemudahan, transparan, ketepatan waktu dan kenyamanan masyarakat. Sebagai kecamatan baru, maka masih terdapat beberapa kekurangan dalam hal pembangunan infrastruktur jika dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya. Selain terbatasnya kualitas sumberdaya manusia, minimnya pembangunan infrastruktur merupakan kendala tersendiri dalam aspek pembangunan di Kecamatan Siniu. Beberapa hasil evaluasi terhadap pemekaran wilayah daerah menunjukan bahwa kebanyakan daerah-daerah pemekaran secara umum memang tidak berada dalam kondisi awal yang lebih baik jika dibandingkan daerah induk atau daerah control.

Namun setelah dimekarkan ternyata daerah-daerah tersebut juga belum mencapai harapan dan tujuan pemekaran wilayah itu sendiri. Beberapa data menunjukan, laju pertumbuhan ekonomi Kecamatan Siniu mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, akan tetapi data ini berbanding terbalik dengan realitas

pembangunan infrastruktur yang ada di Kecamatan siniu. Mengacu hal tersebut diatas, penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana pertumbuhan ekonomi Kecamatan Siniu? Serta Apa saja kendala dalam pengembangan Kecamatan Siniu hasil pemekaran dan dampaknya terhadap peningkatan perekonomian daerah?

METODE

Pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini bermaksud mendapatkan gambaran nyata implementasi pemekaran wilayah secara sistematis dan factual di lapangan. Serta kecenderungan pencapaian hasil kebijakan pemekaran Kecamatan Siniu. Menurut Newman (1997:19) penelitian deskriptif kualitatif mampu menyajikan gambaran secara detail dari sebuah situasi dan setting social. Menurut Danim(2002:61), pada pendekatan kualitatif, data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambar dan bukan angka. Kalaupun ada angka-angka sifatnya hanya sebagai penunjang. Data dimaksud meliputi transkrip wawancara, catatan dan lapangan, foto-foto, dokumen pribadi, nota dan catatan lain. Atas alasan tersebutnya dipilih pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah

pendekatan yang tidak mengadakan perhitungan. Moloeng, lexy J. (2991:2) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena social dan menyajikan gambaran yang lengkap mengenai masalah-masalah yang terdapat dalam penelitian, hal ini lazim disebut penelitian deskripsi. Sedangkan yang menjadi kajian adalah bagaimana perkembangan pemekaran wilayah Kecamatan Siniu. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

PEMBAHASAN

Evaluasi Kebijakan Pemekaran Kecamatan Siniu Terbentuknya Kecamatan Siniu didasari oleh keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui: peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah (PP No 129 Tahun 2000). Dalam PP No 78 tahun

2007 juga dijelaskan selain persyaratan administrasi, ada 4 faktor penting yang harus diperhatikan dalam pembentukan daerah yakni factor kependudukan, factor kemampaun ekonomi, kemampuan keuangan dan potensi daerah, jika salah satu factor ini tidak memenuhi syarat maka suatu wilayah tidak layak untuk dibentuk atau ditolak. 3 faktor evaluasi pembentukan Kecamatan Siniu dijabarkan sebagai berikut:

1. Faktor Kependudukan

Factor kependudukan dinilai dari jumlah penduduk dan kepadatan penduduk. Pada tahun 2008, jumlah penduduk Kecamatan Siniu mencapai 8301 jiwa sedangkan jumlah penduduk Kecamatan induk (Ampibabo) berjumlah 20.579 jiwa. Dari perbandingan jumlah penduduk diperoleh bahwa jumlah penduduk Kecamatan Siniu masih jauh dibawah jumlah penduduk Kecamatan Ampibabo sebagai kecamatan induk atau asal.

2. Faktor Kemampuan ekonomi

Dari factor ekonomi dilihat dari PDRB perkapita, pertumbuhan ekonomi dan kontribusi PDRB Kecamatan Siniu terhadap PDRB perkapita Kecamatan Siniu pada tahun 2008 sebesar Rp. 5.250.736 dibawah dari PDRB perkapita Kecamatan Ampibabo yakni sebesar Rp. 5395.760. laju pertumbuhan Kecamatan Siniu pada tahun 2008

sebesar 11.65% terhadap PDRB Keseluruhan, jumlah ini lebih besar jika dibandingkan dengan Kecamatan Ampibabo yang pada tahun 2008 laju pertumbuhan menurun menjadi 8.17%.

3. Potensi daerah

Potensi wilayah kecamatan-kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong relatif sama, yaitu besarnya sumberdaya alam. Hanya dibedakan oleh sub sector potensi terbesar Kecamatan Siniu adalah pertanian tanman, perkebunan khususnya kelapa dan kakao. Setelah Kecamatan Siniu terbentuk pada tahun 2008, potensi pertanian untuk tanaman bahan makanan dan perkebunan kecamatan Ampibabo mengalami penurunan.

Berdasarkan hasil penelitian, struktur ekonomi di Kecamatan Siniu mengalami peningkatan, ini dilihat dari peningkatan nilai PRB ADBH dan PDRB ADHK dan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Selain itu, kontribusi sector pembentuk PDRB menunjukan bahwa 6 sector pertanian merupakan sector yang memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB kecamatan Siniu. Jika dilihat dari jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Parigi Moutong diketahui bahwa jumlah rumah tangga miskin di Kecamatan Siniu relative lebih rendah jika dibandingkan dengan

Kecamatan sebelumnya. Secara umum pemekaran wilayah telah berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi Kecamatan Siniu. Hal ini bisa dilihat dari terbentuknya Kecamatan baru menciptakan perbaikan pembangunan diantaranya perbaikan kegoatan ekonomi, ini di dukung oleh tersediannya insfrastruktur seperti sarana dan prasarana transportasi, Kesehatan, maupun Pendidikan.

Dari informasi masyarakat serta aparat pemerintah Kecamatan Siniu diperoleh berbagai aspek pembangunan ekonomi, dikatakan bahwa pemekaran wilayah telah mampu memberikan perubahan terhadap pembangunan ekonomi di Kecamatan Siniu, namun perubahan tersebut dinilai relative kecil. Kendala dalam Pemekaran Kecamatan Siniu Aspek Pertumbuhan Ekonomi Dari aspek pertumbuhan ekonomi menunjukan bahwa Kecamatan Siniu lebih fluktuatif dibandingkan dengan kecamatan induk. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh dominannya sector pertanian sebagai komponen terbesar dalam perekonomian Kecamatan Siniu. Namun sector pertanian sangat rentan terhadap perubahan harga, pergantian musim maupun iklim.

Akibatnya perubahan sedikit saja pada komponen tersebut bisa berpengaruh pada pembentukan PDRB Kecamatan Siniu. Dikethui bahwa

Kecamatan Siniu telah melakukan upaya perbaikan kinerja perekonomian, namun karena masa transisi membutuhkan proses maka belum semua potensi ekonomi dapat digerakan. Dari sisi pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Sinium belum dapat mengejar ketertinggalan dari Kecamatan Induk, ini bisa dilihat dari jumlah keluarga menurut tahapan kesejahteraan pada tahun 2009-2011 dimana jumlah keluarga pra sejahtera lebih mendominasi dibandingkan keluarga kategori sejahtera. Ketertinggalan ini disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya manusia yang tersedia. Keterbatasan SDM terlihat dari sedikitnya jumlah tenaga ahli atau PNS yang mampu menggerakan sector sekunder atau tersier di Kecamatan.

Ini menyebabkan struktur perekonomian Kecamatan Siniu belum mengalami pergeseran ke arah manufaktur karena masih sangat tergantung oleh sector alam atau sumber daya alam. 7 Aspek Pelayanan Publik Sector Pendidikan merupakan bagian penting dalam pelayanan public. Permasalahan aspek Pendidikan di Kecamatan Siniu antara lain mencakup fasilitas pelayanan Pendidikan, khususnya jenjang Pendidikan menengah atas yang hanya berjumlah 2 unit, serta ketersediaan

pendidik yang belum memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas. Ketersediaan sarana sekolah yang ada di Kecamatan Siniu masih sangat minim. Pertambahan jumlah murid yang terus meningkat setiap tahunnya ternyata tidak sebanding dengan pertambahan tenaga pendidik. Ketersediaan tenaga pendidik merupakan unsur utam keberhasilan pembangunan sector Pendidikan. Rasio jumlah siswa per guru memiliki pengaruh terhadap efektivitas proses belajar mengajar di sekolah, dan lebih jauh lagi terhadap upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kecamatan Siniu.

Dibidang Kesehatan, ketersediaan fasilitas Kesehatan di Kecamatan Siniu tidak jauh berbeda dengan kecamatan induk yaitu ampibabo. Sejak terbentuk pada tahun 2008 terjadi peningkatan jumlah fasilitas Kesehatan. Walaupun relative kecil namun fasilitas Kesehatan tersebut dirasakan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dari data diperoleh tenaga Kesehatan saat ini terdiri dari 9 dokter umum, 9 bidang 1 perawat dan 6 tenaga lainnya. Kondisi tersebut lebih baik jika dibandingkan pada awal terbentuknya pada tahun 2008. Kondisi ini bisa diartikan bahwa pemerintah kecamatan Siniu berupaya mendorong pemerataan pelayanan Kesehatan terutama di bidang fasilitas umum. Namun pelayanan harus tetap ditingkatkan agar sasaran

pembangunan dibidang Kesehatan bisa tercapai.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukan bahwa laju pertumbuhan yang diukur dari PDRB Kecamatan Siniu meningkat dari sejak tahun terbentuknya. Namun peningkatan relative kecil. Pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Siniu belum stabil walaupun telah melakukan upaya peningkatan perekonomian khususnya dibidang pertanian. Sebagai sector utama di Kecamatan Siniu, sector pertanian sangat rentan terhadap kondisi alam. Oleh karena itu pertumbuhan Kecamatan Siniu masih sangat bergangung pada kondisi atau gejolak alam. Dari aspek pelayanan public, yaitu Pendidikan dan kesehatan dapat disimpulkan belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan kondisi sarana sekolah dan murid yang tidak sebanding dengan jumlah tenaga pendidik. Sedangkan dibidang Kesehatan sejak terbentuk pada tahun 2008 terjadi peningkatan jumlah fasilitas Kesehatan. Walaupun relative kecil namun fasilitas Kesehatan tersebut dirasakan sangat bermanfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Syaukani/A.Gaffar/R.Rasyid, H. . (202 C.E.). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan (PUSKAB)*. Pustaka Belajar.

Receive : 27 May 2025
Revised : 30 May 2025
Accepted : 31 May 2025

P-ISSN : 1858-084X
E-ISSN : 2808-5213
DOI : 10.55100/administrator.v7i1.101

- Patton, Michael Quinn. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Terj (Budi Puspo Priyadi).1991.Metode Evaluasi Kualitatif.
- AG, Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah. 2003. *"Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah"*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi. Daerah*. BPFE. Yogyakarta.
- Ratnawati, Tri. 2009. *Pemekaran Daerah dan Beberapa Isu Terseleksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Newman, Lawrence W. (1997). *Social Research Methods Qualitative and. Quantitative Approaches*. Boston:
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja. Rosdakarya.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Becoming a Qualitative Researcher*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2008 tentang kecamatan
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 129 Tahun 2000 mengatur persyaratan dan kriteria pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah. Peraturan

Daerah Kabupaten Parigi Moutong No 17 tahun 2007 tentang pembnetukan Kecamatan Siniu BPS Kabupaten Parigi Moutong, Kecamatan siniu dalam angka 2010